



## MULTI STAKEHOLDER APPROACH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

### *MULTI STAKEHOLDER APPROACH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT)*

Muhamad Aqshari Djuliansyah<sup>1</sup> Pandhu Yuanjaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

#### INFORMASI ARTIKEL

##### Article history:

Diterima 24-10-24

Diperbaiki 25-10-24

Disetujui 29-10-224

##### Kata Kunci:

Multi stakeholder,  
Penanggulangan kebakaran  
hutan, pengaruh dan  
kepentingan

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *stakeholder approach* dan memberikan rekomendasi kedepan dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi *stakeholder*, serta investigasi hubungan antar *stakeholder* menjadi pembahasan. Persoalan itu dipetakan dalam indikator pengaruh dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder*. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil klasifikasi *Stakeholder* dalam penanggulangan ini diklasifikasikan menjadi berikut: 1) *Key Player*, BPBD Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat; 2) *Subject*, Balai Pemantapan Kawasan Kehutanan Wilayah III Pontianak, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat; 3) *Context Setter*, BMKG Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat; 4) *Crowd*, GAPKI Kalimantan Barat dan Pasukan TBBR selaku kelompok adat. Berbagai *stakeholder* tersebut juga berhubungan dengan bentuk saling melengkapi dan bekerjasama. Meskipun pertentangan akan individualisme *stakeholders* kerap kali terjadi antar *stakeholder*, karena kompleksnya permasalahan dan ingin menunjukkan jadi diri *stakeholders* dalam penanggulangan masalah kebakaran hutan ini.

#### ABSTRACT

This research aims to analyze the stakeholder approach and provide future recommendations for dealing with forest fires in West Kalimantan Province. Identification, classification and categorization of stakeholders, as well as investigation of relationships between stakeholders are discussed. This problem is mapped into indicators of the influence and interests of each stakeholder. This research is of qualitative type with a descriptive research design. This research was conducted in West Kalimantan Province. Checking the validity of the data was carried out by source triangulation. Data analysis techniques are carried out using data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the Stakeholder classification in this response are classified as follows: 1) Key Player, West Kalimantan BPBD, West Kalimantan Environment and Forestry Service; 2) Subject, Pontianak Region III Forestry Area Stabilization Center, West Kalimantan Natural Resources Conservation Center; 3) Context Setter, West Kalimantan BMKG and West Kalimantan Plantation and Livestock Service; 4) Crowd, GAPKI West Kalimantan and TBBR Troops as traditional groups. These various stakeholders are also related in a form of complementarity and cooperation. Even though conflicts regarding stakeholder individualism often occur between stakeholders, because of the complexity of the problem and they want to show themselves as stakeholders in overcoming this forest fire problem.

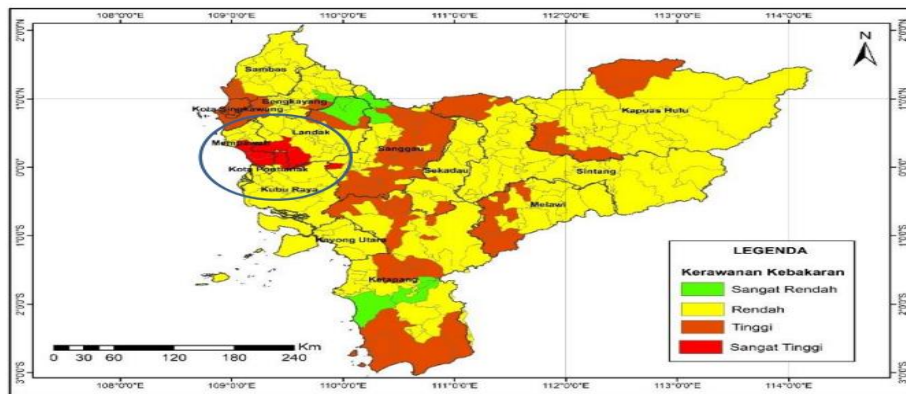
Keywords: Multi stakeholder,  
forest fire management,  
influence and interest

DOI:

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menduduki urutan ketiga yang mempunyai hutan terbesar jika dilihat dari persebaran hutan di dunia. Hutan menjadi salah satu sumber kekayaan yang tidak bisa dipisahkan, karena memang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Hal ini yang menja dikan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwasannya, hutan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Dengan tiga fungsi tersebut, manusia ingin memanfaatkan fungsi tersebut dengan hal lain dari tiga fungsi itu mereka ingin memanfaatkan fungsi tersebut terutama produksi dengan instan. Tujuan utamanya, yaitu mendapatkan keuntungan dengan cepat tanpa memperhatikan efek samping yang ditimbulkan. Salah satu kegiatan yang dilakukan tentunya tak lain dengan membakar hutan secara brutal dengan tujuan membuka aktivitas masyarakat, seperti pemukiman, usaha maupun ladang-ladang terutama pada musim kemarau. Belakangan ini, kondisi hutan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, hingga menarik perhatian dunia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan sebuah peristiwa bencana secara alami ataupun dikarenakan ulah manusia, yang membawa kerugian di berbagai bidang baik ekonomi, ekologi, sosial budaya, bahkan politik. Terutama, ketika kebakaran hutan tersebut terjadi di lahan gambut yang memiliki kandungan pH asam yang tinggi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki luas lahan gambut sekitar 20,6 juta hektar, menempati 50% luas lahan gambut tropika di dunia atau sekitar 10,8% dari luas lahan di dataran Indonesia (Wahyunto *et al*, 2005). Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki konsensi lahan gambut yang luas adalah Provinsi Kalimantan Barat. kebakaran hutan dan lahan lebih sering terjadi di Kalimantan Barat karena mayoritas tanah gambut yang memberikan efek lebih parah ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut data (<http://pkgppkl.menlhk.go.id/>) 16 (enam belas) Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tersebar di tiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat, dengan total 107.794 Ha atau (13%), kawasan budaya 695.774 Ha atau (87%). Namun, kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat terus terjadi dan kemungkinan besar terjadi di lokasi yang sama.



Gambar 1. Pemetaan Daerah Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintah Kalimantan Barat dilihat belum optimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya. Dapat dilihat dari efek kebakaran hutan yang dirasa langsung, Kabut asap yang merupakan efek dari kebakaran hutan dan lahan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa *stakeholder* sangat penting dalam penanganan bencana. Menurut Mawasdi et al. (2014), tujuan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat adalah untuk membuka lahan pertanian, membersihkan lahan setelah panen, meningkatkan produktivitas tanah, dan meningkatkan kesuburan tanah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan bahwa, penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan atas unsur pelaksanaan yang memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pengendalian atas bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan harus dilakukan secara sistematis, tuntas dan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Republik Indonesia meluncurkan program baru dengan *pilot project* berbentuk *multi-stakeholders approach*. Konsep pendekatan “*Multi Stakeholders Approach*” ini berfokus tidak hanya pada masalah yang dihadapi oleh berbagai pihak berwenang, tetapi juga melibatkan *stakeholder* lain seperti pihak swasta, *Non Government Organization* (NGO) maupun masyarakat. *Multi Stakeholders Approach* dalam upaya pencegahan tersebut menitikberatkan dan berfokus di daerah rawan bencana kebakaran dan kabut asap dengan menghasilkan deteksi dini dan pusat bantuan dengan membuat pencegahan yang jauh lebih siap dan matang. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan melakukan analisis terkait *multi-stakeholder approach* dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti memaparkan terkait kondisi

kebakaran hutan yang terjadi pada Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian, menganalisis penanggulangannya yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Berdasarkan pendahuluan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah, yakni Bagaimana *Multi Stakeholders-Approach* dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat serta Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan hasil analisis *multi stakeholders-approach* dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai *Multi Stakeholder Approach* dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti, menganalisis dan juga untuk menjelajahi sebuah kondisi tertentu atas suatu kejadian atau peristiwa yang alamiah yang tidak bisa dipecahkan oleh angka (Creswell, 2013). Pendekatan deskriptif kualitatif bermaksud untuk memahami terkait persoalan yang dialami oleh subjek penelitian (*Stakeholder*), seperti perilaku, persepsi, tindakan serta hambatan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dengan harapan penelitian ini mendapatkan informasi lengkap mengenai analisis mengenai *Multi Stakeholder Approach* dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga swasta dan juga kelompok masyarakat. Peneliti. Sedangkan untuk waktu pengambilan data-data, pengolahan data dan penyajian data dimulai dari Januari 2024 hingga Juli 2024. Subjek dari penelitian ini atau informan merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan terkait keadaan dan kondisi dari latar penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* untuk menentukan informan awal, kemudian dikembangkan dengan teknik *snowball*. Penelitian ini mengkaji objek yang berupa kebijakan dan program pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk sikap dan perilaku masyarakat dalam keterlibatannya untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan juga sekunder. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti dituntut untuk mampu menggali data berdasarkan apa yang diucapkan. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan. Pada penelitian ini data primer diperoleh berupa wawancara kepada informan dari Staff Seksi SDHTL (Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak, Kepala Seksi Pengendali Dampak Lingkungan Muda, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Koordinator Bidang Data dan Informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalimantan Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku hasil kajian antar stakeholders, policybrief yang didapatkan dari instansi terkait, jurnal serta peraturan perundang-undangan atau peraturan gubernur yang terkait dalam penanggulangan kebakaran hutan yang melibatkan stakeholders didalamnya. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, Dimana peneliti bertindak sebagai instrument sebagai instrument utama yang melakukan proses pengumpulan data yang didasarkan kepada pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

Pada proses pengumpulan data, triangulasi sumber diartikan sebagai sebuah teknik yang sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik-teknik pengumpulan data dan juga sumber-sumber data yang telah ada. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari jawaban tiap informan pada saat melakukan wawancara baik dari aktor pemerintah yaitu organisasi perangkat daerah (OPD), pihak swasta serta masyarakat sipil atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Proses analisis data dapat dipahami sebagai suatu proses pencarian serta penyusunan secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan jualan bahan lain yang diberikan oleh informan. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan Kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Wilayah Kalimantan menempati peringkat pertama jumlah kawasan pertanian yang mengalami kebakaran yaitu 2,8 juta hektar (Yuniarto, 2023). Bahkan, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya pada area Kalimantan Barat telah menjadi rutinitas tahunan. Provinsi Kalimantan Barat saja, menurut laporan *Kebakaran Hutan dan Lahan* oleh World Resources Institute Indonesia (WRI), kebakaran hutan dan lahan menghabisi 2,7 juta hektar hutan dengan mayoritas di antaranya merupakan jenis hutan hujan tropis di tahun 2023. Tingginya kasus kebakaran hutan tersebut, terbentuklah Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagaimana pada Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 356/BPBD/2023 menjadi contoh nyata keseriusan dari pemprov dalam menangani kebakaran. pemerintah melalui regulasi tersebut melakukan *multistakeholder* dengan membentuk tim

husus yang terdiri dari berbagai hierarki pemerintahan dalam penanganan kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat, baik pemerintah pusat maupun daerah.

### 3.1 Identifikasi Stakeholder

Dalam tahapan Identifikasi *stakeholder* banyak *stakeholder* yang terlibat dikarenakan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menetapkan bencana kebakaran hutan merupakan persoalan prioritas yang harus sedini dan secepat mungkin untuk ditanggulangi. Identifikasi *stakeholder* perlu dilakukan, sebagai bentuk pemahaman yang jelas terkait permasalahan yang dihadapi (Reed, 2009). Tak mengherankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai membentuk tim khusus bernama Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kalimantan Barat Tahun 2023. Tim itu terdiri dari berbagai *stakeholder* mulai dari lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, praktisi hingga pelaku usaha (Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 356 BPBD Tahun 2023).

Pengidentifikasian *stakeholder* dilakukan dengan menganalisis peran, termasuk dampak atau terkena dampak dari penanganan kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat. Identifikasi ini diperlukan guna untuk mengenali dan memahami kepentingan dan hubungan setiap *stakeholder* (Kusumedi & HB, 2010).

Tabel 1. Analisis Identifikasi peran *Stakeholder* dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama Pihak	Peran	Keterangan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat	Pihak Penggerak ( <i>Leading Sektor</i> ) penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Daerah
2.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Barat	Lembaga yang menganalisis data dan menyajikannya kepada stakeholder lain maupun publik terkait perubahan suhu, cuaca, dan iklim akibat kebakaran hutan	Pemerintah Daerah
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	Perlindungan, pengendalian, dan pengelolaan hutan, termasuk konservasi	Pemerintah Daerah

		maupun rehabilitasi kawasan hutan akibat kebakaran	
4.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat	Pencegahan, mitigasi dan sosialisasi bencana kebakaran dengan lebih spesifik pada area perkebunan, termasuk pengawasan dan monitoring aktivitas perkebunan masyarakat	Pemerintah Daerah
5.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III Pontianak	Penyiapan segala data yang berkaitan dengan kawasan kehutanan, termasuk penilaian dan pemanfaatannya	Pemerintah Pusat
6.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat	Upaya preventif terhadap berbagai kerusakan sumber daya alam termasuk kebakaran yang melanda hutan	Pemerintah Pusat
7.	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Provinsi Kalimantan Barat	Pengadaan program dan kegiatan yang mendukung pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat	Kelompok Kepentingan
8.	Pasukan Tariu Borneo Bangkule Rajakng	Partisipasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan pada Provinsi Kalimantan Barat	Masyarakat

Pada tabel identifiikasi tersebut memperlihatkan banyak pihak, terutama 8 pihak pokok yang terlibat dan memiliki masing-masing peran dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. *Stakeholder* menjadi orang atau pihak dengan suatu kepentingan atau perhatian pada masalah tertentu (Freedman, 2000).

### 3.2 Klasifikasi dan Kategorisasi Stakeholder

Pengklasifikasian menjadi tahap selanjutnya dalam proses analisis

*stakeholder*, berupa pengelompokan dan pengkategorisasian *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan metode pengelompokan *stakeholder* yang digunakan yaitu, *interest-influence matrices*. Metode ini menganalisis *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dalam suatu permasalahan. Hal ini karena memang analisis *stakeholder* berfokus pada dua hal, yakni kepentingan dan kekuatan untuk menggunakan sumberdaya (Crosby, 1991:2). untuk mengelompokkan *stakeholder* yang telah teridentifikasi.

Dalam penentuan klasifikasi dan kategorisasi yang pertama dilakukan adalah analisis dengan derajat kepentingan, penentuan tersebut didasarkan atas tingkatan tersendiri tiap *stakeholder* dalam penanganan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Tingkatan tersebut bisa dibedakan menggunakan metode skoring berdasarkan tingkat kepentingan yang terdiri dari keterlibatan, manfaat, dan harapan, serta tingkat pengaruh yang terdiri dari kontribusi, kewenangan, dan kemampuan.

Tabel 2. Pengukuran Skor *Stakeholder* dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat

Nama Stakeholder	Pengaruh			Kepentingan			Skor Koordinat
	kewenangan	Kontribusi	Kemampuan	Keterlibatan	Manfaat	Harapan	
BPBD Provinsi Kalimantan Barat	3	3	2	3	3	3	8,9
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat	3	3	2	2	3	3	8,8
BMKG Provinsi Kalimantan Barat	2	2	2	1	2	2	6,5
Dinas Perkebunan dan Peternakan	2	2	3	2	1	2	7,5
Balai Pemantapan Kawasan Kehutanan Wilayah III Pontianak	1	2	1	2	2	2	4,6
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat	1	2	1	2	2	3	4,7
GAPKI Provinsi Kalimantan Barat	0	2	1	2	1	1	3,4

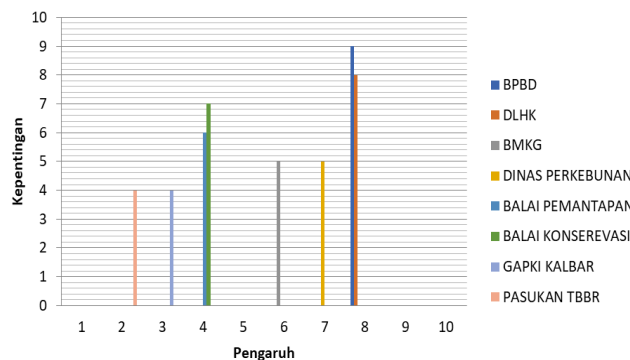


Pasukan TBBR	0	1	1	2	1	1	2,4
--------------	---	---	---	---	---	---	-----

Berdasarkan tabel diatas, setiap stakeholder memiliki pengukuran koordinat skor yang berbeda, karena memang tingkat kekuatan dan pengaruhnya berbeda-beda pula. Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada Provinsi Kalimantan Barat, multistakeholder memang terlibat dan dilibatkan mengingat besarnya resiko bencana ini.

Berdasarkan penilaian (skoring) tingkat pengaruh dan kepentingannya diatas, dapat terbentuk diagram dengan koordinat sesuai kategori *stakeholder* dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut diagram tersebut:

Tabel 3. Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat



Jenis *Interest-influence matrices*, pengelompokan *stakeholder* terbagi dalam 4 kelompok yaitu: *subject*, *key players*, *crowd*, *contest setters* (Eden & Ackermann, 1998). Pembagian sebagai berikut, 1.) Key Player terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. 2.) Contest Stters yang terdiri dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Barat dan juga Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. 3.) Subject yang terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata lingkungan Wilayah III (BPKHTL) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir 4.) Crowd yang terdiri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Provinsi Kalimantan Barat da juga Pasukan Borneo Bangkule Rajakng (TBBR).

### 3.3 Penyelidikan Hubungan Stakeholder

Investigasi hubungan ini digunakan untuk menentukan hubungan antar masing-masing *stakeholder*, saling mendukung atau bertentangan, maupun saling melengkapi atau bekerjasama. Dalam penelitian penanganan kebakaran hutan ini, metode analisis investigasi antar *stakeholder* menggunakan *actor-linkage matrices*. Metode itu dipilih karena memang *actor-linkage matrices* mampu menghasilkan analisis hubungan yang dilengkapi dengan unsur yang ada dalam jalinan hubungan

antar *stakeholders* tersebut. dapat diketahui bahwasannya semua stakeholder saling berhubungan satu sama lain dalam penanganan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Arah komunikasinya juga beragam dan menyebar pada seluruh stakeholder, baik sekedar koordinasi secara horizontal dari pihak satu dengan yang lain, maupun vertikal maupun bottom up dengan memberikan perintah atau tanggungjawab dalam penanganan kebakaran.

### **3.4 Pertentangan antar Stakeholder**

Pada hubungan antar *stakeholder* dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat tentu tidak terlepas dari perseteruan dan pertentangan beberapa kali terjadi antar *stakeholder* mengingat kompleks dan rumitnya permasalahan ini. Perseteruan tersebut terlihat bukan pada antar *stakeholder* dari pihak pemerintah, tetapi antara pemerintah dengan kelompok kepentingan maupun kelompok kepentingan dan masyarakat. Beberapa perusahaan yang tergabung dalam GAPKI Kalimantan Barat yang terbukti melakukan pelanggaran dengan pembakaran hutan maupun area perkebunan secara luas dan tak terkendali mendapatkan sanksi berupa pencabutan izin dan penetapan pidana. Alhasil, beberapa kali *stakeholder* dari pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup dan Lingkungan dengan GAPKI Kalimantan Barat sempat tak memiliki hubungan yang baik.

Disisilain, perseteruan antara stakeholder dengan stakeholder tentu juga tidak bisa dilepaskan ketika memasuki fokus dalam penanggulangan bencana ini, terlebih ketika memasuki musim kemarau di Provinsi Kalimantan Barat. Dari beberapa wawancara terhadap narasumber tersebut, dua dari beberapa sumber mengatakan sering kali tiap tahun terlebih pada proses dilapangan hal ini tidak bisa dielakan lagi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dua instansi ini yang menuturkan bahwa sikap “Individualis Stakeholder” ketika dilapangan sangat sering ditemukan. Ketika ditanya kenapa bisa demikian kedua instansi ini menarik benang merah dan mengatakan “ Kalau dalam bencana gini mas, terlebih dilapangan dan pasca penanggulangan mereka ingin menunjukkan identitas mereka mas kalau mereka yang memiliki kemampuan dan penanganan lebih dalam bencana ini, terlebih ketika disorot oleh awakmedia mereka ingin tampil digarda terdepan tapi melupakan kolaborasi dari beberapa stakeholders”. Tidak diberitahu secara detail bahwa dinas atau instansi mana yang melakukan hal tersebut, namun setiap tahun mereka menuturkan pasti ditemukan permasalahan demikian dalam kolaborasi multistakeholders approach.

## 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa terdapat 8 stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swasta dan juga kelompok adat atau masyarakat. Melalui peran dan kepentingan tersebut, 8 (*stakeholder*) *stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya sebagai berikut: 1) *Key Player*, BPBD Kalimantan Barat dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2) *Subject*, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wiayah III Pontianak 3) *Context Setter*, BMKG Kalimantan Barat dan Dinas Perkebunan dan Peternakan 4) *Crowd*, GAPKI Kalimantan Barat dan Pasukan TBBR Masyarakat Adat Suku Dayak. Seluruh stakeholder tersebut memiliki hubungan yang berkesinambungan dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada beragamnya jalinan interaksi terkait pelaksanaan peran dan program yang dijalankan oleh masing-masing stakeholder, baik koordinasi, komunikasi, monitoring, dan evaluasi. Meskipun demikian terdapat beberapa stakeholder yang mengalami beberapa kali perseteruan dan pertentangan (*individual stakeholders*) dalam persoalan kebakaran hutan, baik antara pemerintah dengan lembaga swasta atau pemerintah dengan masyarakat atau juga sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pendekatan *Multi Stakeholder* Dalam Penanggulangi Kebakaran Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwasannya, analisis *stakeholder* dengan adanya *key stakeholder*, *subject*, hingga *crowd* sesuai peran dan kepentingannya. Ada hubungan saling bekerjasama dan melengkapi dari berbagai *stakeholder* terutama *stakeholder* pemerintah, baik pada lembaga pemerintahan pusat maupun daerah. Meskipun, pertentangan dan perseteruan beberapa kali muncul antar stakeholder terutama ketika terdapat penindakan hukum dari pemerintah terhadap pelaku pembakaran hutan, baik pencabutan ijin usaha dan konsesi lahan hingga

penangkapan maupun penindakan hukum pidana bagi oknum yang membakarnya. Selain itu juga, keterbatasan riset mengenai penanggulangan kebakaran hutan dengan metode-metode terbaharukan sangat minim ditemukan. Hal tersebut juga berpengaruh dalam menentukan alur kebijakan atau arah penanggulangan dengan mempertimbangkan riset-riset terbaharukan tentang penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat. Harapannya tentu, analisis *stakeholder* yang memperlihatkan pengaruh dan kepentingannya ini dapat membuat berbagai *stakeholder* memaksimalkan kewenangan maupun perannya tanpa mengedepankan sikap individual tiap stakeholder sehingga kebakaran hutan dan lahan pada Provinsi Kalimantan Barat dapat ditekan dengan tak menyebabkan dampak yang meluas.

### **Saran**

Saran yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan agar pelaksanaan *multi stakeholder approach* dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih dioptimalkan yaitu : pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus lebih banyak mengambil peran dalam penanganan mengenai kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat dengan lebih aware dan tanggap mengingat persoalan ini menjadi permasalahan publik yang menjadi kewajiban dari pemerintah. Selain itu, perlunya pengawasan dan monitoring ketat dari pemerintah baik daerah ataupun pusat dalam penanggulangan ataupun mitigasi penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat terutama partisipasi dari pihak-pihak swasta lebih ditingkatkan. Serta, perlunya pelibatan lebih banyak pihak-pihak swasta terutama *Non-Government Organization* (NGO) yang berfokus kepada persoalan dan lingkungan dan juga mengencangkan masyarakat adat atau kelompok masyarakat agar lebih aware mengingat potensi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi dengan konsensi lahan gambut yang luas. [1], [2], [10]–[14], [3], [4], [4]–[9]

### **Referensi**

- [1] Y. Harlyandra and K. A. Kafaa, “Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon,” *GulawentahJurnal Stud. Sos.*, vol. 6, no. 1, p. 54, Jun. 2021, doi: 10.25273/gulawentah.v6i1.9471.
- [2] M. P. Permatasari and N. L. P. Setyastrini, “Faktor Yang Memengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Negara Maju Dan

- Berkembang Bukti Empiris Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder,” *J. Akunt. dan Perpajak.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–3, 2019, doi: 10.26905/ap.v5i1.2559.
- [3] H. A. Rosit, A. Mardhotillah, R. A. Delazenitha, S. Mutiarani, and T. V. C. Sulle, “Identifikasi dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Zonasi Wilayah Rawan Kebakaran dengan Teknologi Geospasial,” *Widya Bhumi*, vol. 3, no. 1, pp. 13–30, May 2023, doi: 10.31292/wb.v3i1.53.
- [4] A. Arisman, “Analisis Tren Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Periode Tahun 2015-2019,” *J. SAINS Teknol. Lingkung.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–9, Jun. 2020, doi: 10.29303/jstl.v6i1.131.
- [5] S. Sawerah, P. Muljono, and P. Tjitropranoto, “Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat,” *J. Penyul.*, vol. 12, no. 1, Mar. 2016, doi: 10.25015/penyuluhan.v12i1.11323.
- [6] T. F. Dicelebica, A. A. Akbar, and D. R. Jati, “Identifikasi dan Pencegahan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kalimantan Barat,” *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 20, no. 1, pp. 115–126, Jan. 2022, doi: 10.14710/jil.20.1.115-126.
- [7] L. Adithea, M. Ruslan, F. H. Yusran, and F. Rianawati, “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat DI Kecamatan Basarang kabupaten Kapuas Kalimantan Barat,” *EnviroScienteac*, vol. 11, no. 2, pp. 1–9, 2015.
- [8] E. Achyar, D. Schmidt-Vogt, and G. P. Shivakoti, “Dynamics of the multi-stakeholder forum and its effectiveness in promoting sustainable forest fire management practices in South Sumatra, Indonesia,” *Environ. Dev.*, vol. 13, pp. 4–17, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.envdev.2014.11.002.
- [9] K. Hoover and L. A. Hanson, “Wildfire Statistics,” *Congr. Res. Serv.*, p. 2, 2023, [Online]. Available: <https://fas.org/sgp/crs/misc/IF10244.pdf>
- [10] Y. Astuti, D. Astiani, and R. Herawatiningsih, “PENGARUH PEMBAKARAN BERULANG PADA LAHAN GAMBUT TERHADAP BEBERAPA KARAKTERISTIK TANAH DI DESA RASAU JAYA UMUM KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT,” *J. HUTAN LESTARI*, vol. 8, no. 3, Oct. 2020, doi: 10.26418/jhl.v8i3.42810.
- [11] D. R.A., *A review of fire projects in Indonesia (1982-1998)*. 1999. doi: 10.17528/cifor/000564.
- [12] A. Rachman, B. H. Saharjo, and E. I. K. Putri, “Forest and Land Fire Prevention Strategies in the Forest Management Unit Kubu Raya, South Ketapang, and North Ketapang in West Kalimantan Province,” *J. Ilmu Pertan. Indones.*, vol. 25, no. 2, pp. 213–223, Apr. 2020, doi: 10.18343/jipi.25.2.213.

- [13]Y. Harlyandra and K. A. Kafaa, “Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon,” *GulawentahJurnal Stud. Sos.*, vol. 6, no. 1, p. 54, Jun. 2021, doi: 10.25273/gulawentah.v6i1.9471.
- [14]T. F. Dicelebica, A. A. Akbar, and D. R. Jati, “Identifikasi dan Pencegahan Daerah Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kalimantan Barat,” *J. Ilmu Lingkung.*, vol. 20, no. 1, pp. 115–126, Jan. 2022, doi: 10.14710/jil.20.1.115-126.
- [15] Theola Daegal, E. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara
- [16]I. Ganesha and D. Hartanti, “Analisis Stakeholders Management PT ABC Terkait Kasus Kebakaran Lahan,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 7, no. 2, pp. 229–240, 2019, doi: 10.17509/jrak.v7i2.17430.
- [17] “\_media\_peraturan\_2022\_2022perda002.pdf.”